

PROSIDING

Seminar Nasional Swasembada Pangan

Kendari, 9 Maret 2015

Tema : Indonesia Menuju Swasembada Pangan Dalam Tiga Tahun Kedepan:
"Tinjauan Konseptual, Teoritis dan Empiris"



Editor

Hermanto Siregar

Ayub M. Padangaran

Weka Widayati

Atas Kerjasama

Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo (UHO)

Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Komisariat Daerah Kendari

Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI)



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL SWASEMBADA PANGAN

Indonesia Menuju Swasembada Pangan dalam Tiga Tahun Kedepan
Tinjauan Konseptual, Teoritis dan Empiris

Dalam Rangka Pengukuhan Pengurus
Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia
(PERHEPI)
Komisariat Daerah Kendari

Kendari, 9 Maret 2015

Kerjasama

**Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo (UHO)
Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Komisariat Daerah Kendari
Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PP-PERHEPI)**



Unhalu Press

2015

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) di pidana dengan penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL SWASEMBADA PANGAN

Indonesia Menuju Swasembada Pangan dalam Tiga Tahun Kedepan :
Tinjauan Konseptual, Teoritis dan Empiris

Aula Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo, Kendari
9 Maret 2015

Editor :

Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec.
Prof. Dr. Ir. Ayub M Padangaran, MS
Prof. Dr. Ir. Weka Widayati, MS

Desain Cover :

Hajat Ahmadnur

Diterbitkan pertama kali pada bulan Maret 2015
Oleh Unhalu Press
Kampus Hijau Bumi Tridharma
Jalan H.E.A. Mokodompit, Kendari 93231
e-mail: press@unhalu.ac.id, unhalupress@gmail.com

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

HERMANTO SIREGAR

Prosiding Seminar Nasional Indonesia Menuju Swasembada Pangan dalam Tiga Tahun Kedepan:
Tinjauan Konseptual, Teoritis dan Empiris

Penyunting : Hermanto Siregar, Ayub M Padangaran, Weka Widayati – Kendari, Unhalu Press,
2015

564 hlm + xii, 21 x 29,2 cm
ISBN : 978-602-8161-76-3

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam PERHEPI

Sebagai Ketua Panitia Seminar Nasional Swasembada Pangan, Perhimpunan Ekonomi Pertanian (PERHEPI) di Kendari, saya mengucapkan terima kasih Kepada Bapak/ Ibu yang telah berpartisipasi sebagai Pembicara Utama, Pemakalah dan Peserta dalam Seminar Nasional dengan Tema “Indonesia Menuju Swasembada Pangan Dalam Tiga Tahun Ke Depan : Tinjauan Konseptual, Teoritis dan Empiris”. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo, Pengurus PERHEPI Komda Kendari dan Pengurus Pusat PERHEPI.

Salah satu target Pemerintahan Baru Indonesia di bidang pertanian yaitu Indonesia harus mampu swasembada pangan dalam 3 (tiga) tahun kedepan, artinya pada Tahun 2017 bangsa kita sudah mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduk Indonesia.

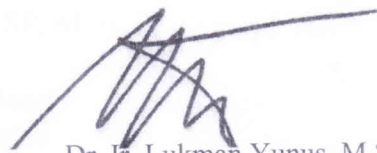
Target pemerintah untuk swasembada pangan tiga tahun ke depan, bukanlah target yang mudah untuk dicapai, mengingat persoalan pangan akan selalu berkaitan dengan isu pokok mengenai ketersediaan lahan, penyediaan sarana dan prasarana produksi, penyediaan infrastruktur pendukung, teknologi pengolahan hasil, permodalan dan kelembagaan, daya saing komoditas dan persaingan pasar, kapasitas sumberdaya manusia, konsistensi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan pembangunan pertanian yang berkelanjutan, serta pengaruh kebijakan internasional yang berkaitan dengan produk pangan dan hasil-hasil pertanian Indonesia.

Adanya isu-isu pokok yang menyertai upaya pencapaian swasembada pangan Indonesia yang telah dicanangkan oleh Pemerintah, merupakan suatu tantangan yang harus dibuktikan dalam tiga tahun ke depan (2017). Untuk mewujudkan kebijakan ini, diperlukan kajian yang utuh dan lengkap dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan keberlanjutan swasembada pangan di Indonesia.

Dalam kaitan ini PERHEPI sebagai salah satu pihak yang turut bertanggungjawab dalam menyukseskan pembangunan pertanian di Indonesia berkewajiban untuk mengkaji, menganalisis dan menyumbangkan “gagasan” dan “buah pikir” dari perspektif tinjauan konseptual, teoritis dan empiris untuk mencapai Indonesia Swasembada Pangan tiga tahun ke depan (2017) agar tidak salah arah, semoga.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Ketua Panitia



Dr. Ir. Lukman Yunus, M.Si

PANITIA PELAKSANA

SEMINAR NASIONAL SWASEMBADA PANGAN
Indonesia Menuju Swasembada Pangan dalam Tiga Tahun Kedepan
Tinjauan Konseptual, Teoritis dan Empiris
Aula Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo
Kendari, 9 Maret 2015

Penanggung Jawab

Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse, MS

Panitia Pengarah

Prof. Dr. Ir. Ayub M. Padangaran, MS
Prof. Dr. Ir. La Rianda, M.Si.
Prof. Dr. Ir. Weka Widayati, MS
H. Abdul Salam, A.Pi, SH, MS
Dr. Ir. Azhar Bafadal, M.Si.

Panitia Pelaksana

Ketua

Dr. Ir. Lukman Yunus, M.Si.

Wakil Ketua

Dr. Ir. H. Saediman, M.Sc.

Sekretaris

Awaluddin Hamzah, SP, M.Si.
Andi Syahrir, STP, M.Si.

Bendahara

Dr. Ine Fausayana, SE, MS
Muhammad Nur, SP, M.Si.

Bidang-Bidang

Kesekretariatan
Persidangan
Acara dan Kehumasan
Publikasi dan Dokumentasi
Perlengkapan
Akomodasi
Konsumsi

STRATEGI PENCAPAIAN KETAHANAN PANGAN

La Ode Afa¹ dan Awaluddin Hamzah²

¹Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo

²Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo
laodeafa@yahoo.com

ABSTRAK

Sebagai negara yang berada di wilayah tropika, Indonesia dianugerahi keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Di daratan maupun lautan tersedia berbagai macam spesies yang potensial untuk didayagunakan sebagai bahan pangan. Walaupun upaya pendayagunaan (diversifikasi pangan) telah dilakukan namun perkembangannya masih lambat. Dalam konteks penyediaan pasokan, diversifikasi adalah salah satu cara adaptasi yang efektif untuk mengurangi risiko produksi akibat perubahan iklim. Diversifikasi juga kondusif untuk mendukung perkembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal. Pada sisi konsumsi, diversifikasi pangan memperluas pilihan pangan dan kondusif untuk mendukung terwujudnya pola pangan harapan. Diversifikasi pangan dapat mendukung stabilitas ketahanan pangan sehingga dapat dipandang sebagai salah satu pilar pemantapan ketahanan pangan.

Kata kunci: Diversifikasi, sumberdaya lokal, ketahanan pangan

PENDAHULUAN

Pangan menjadi salah satu masalah global selain perang, minyak, senjata dan perubahan iklim. Dalam hal pangan, sepanjang sejarah, manusia selalu dihadapkan masalah produksi dan pengadaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang paling dasar. Ketika terjadi krisis pangan, doktrin Malthus diungkit-ungkit kembali. Malthus tahun 1798 mengajukan teori yang berjudul *Essay on the Principle of Population*, intinya bahwa pertumbuhan penduduk akan mengungguli pertumbuhan produksi pangan, kecuali ada perang, wabah penyakit atau bahaya kelaparan. Malthus menulis teorinya pada waktu Inggris dilanda krisis pangan yang serius, yakni sebelum terjadinya revolusi pertanian yang memungkinkan intensifikasi dalam usahatani. Tetapi pada edisi berikutnya Malthus mengungkapkan bahwa pertumbuhan penduduk yang melebihi pertumbuhan produksi pangan adalah suatu tantangan bagi manusia untuk melakukan eksperimentasi dan inovasi di bidang produksi pertanian.

Setelah sekian lama berlalu dengan berbagai dinamika inovasi teknologi pangan dan pengendalian penduduk, ilmuwan terkemuka Jeffrey D. Sachs (*Scientific American*, 2008) masih mengajukan pertanyaan besar apakah benar kita telah mengalahkan Teori Malthus? Waktu dua abad pun belum bisa meyakinkan kita akan jawaban tersebut.

Jumlah penduduk dunia bertambah terus menerus. US Census Bureau memperkirakan tahun 2010 penduduk di Asia Pasific dapat mencapai 4 milyar dimana India dan China berkontribusi lebih dari 2 milyar. Indonesia juga berkontribusi besar dengan jumlah penduduk yang mendekati seperempat milyar jiwa. Pertambahan penduduk Indonesia cukup pesat, tahun 1900 jumlahnya hanya berkisar 40 juta. Peningkatan penduduk Indonesia dalam 40 tahun terakhir adaah 120 juta (1970), 147 juta (1980), 179 juta (1990) dan mencapai 206 juta (2000). Angka terbaru penduduk telah mencapai 225 juta (2007). Dalam 40 tahun terakhir, penduduk telah bertambah lebih dari 100 juta jiwa, sebuah peningkatan yang fantastis (BPS, 2008).

Besarnya jumlah penduduk terkait langsung dengan penyediaan pangan. Konsumsi pangan utama sumber karbohidrat adalah beras. Sebagaimana dilaporkan Pasandaran, sejak tahun 1970-1990 konsumsi beras per kapita per tahun meningkat nyata yaitu 109 kg (1970), 122 kg (1980) menjadi 149 kg (1990). Meskipun setelah tahun 1990, konsumsi beras sedikit menurun namun dipandang masih cukup besar yaitu 114 kg/orang/th pada tahun 2000. Rerata konsumsi per kapita ini merupakan yang terbesar di dunia. Ketidakmampuan menyediakan pangan pokok yang ditandai dengan besarnya impor beras beberapa saat lalu menjadi pertanda yang serius bagi

kita agar memiliki perhatian pada persoalan kependudukan dan penyediaan pangan.

PANGAN DAN PERMASALAHANNYA

Pertumbuhan penduduk yang pesat menuntut pemenuhan pangan yang sangat besar. US Census Bureau mencatat kebutuhan pangan biji-bijian (beras dan jagung) di Asia akan meningkat pesat dari 344 juta ton tahun 1997 menjadi 557 juta ton tahun 2020 dimana kontribusi China dan India sebesar 26 dan 12%. Persoalan krisis pangan dunia yang ditandai kelangkaan pangan dan melonjaknya harga pangan di pasar internasional tahun 2008, salah satunya disebabkan karena membumbungnya permintaan pangan oleh kekuatan ekonomi baru China dan India dengan penduduk masing-masing 1 milyar jiwa.

Permintaan pangan di Era globalisasi diperkirakan lebih dari dua kali lipat dibanding abad pertengahan. Petunjuk utamanya adalah pertumbuhan di dalam populasi dunia dan peningkatan konsumsi makanan berbasis pertanian. Selain itu, ada pengaruh sekunder seperti peningkatan hewan peliharaan dan peningkatan pemborosan makanan oleh konsumen

Dalam konteks Indonesia, produksi pangan yang mampu menjamin kebutuhan penduduk merupakan persoalan yang serius. Meskipun selama 2 tahun terakhir dilaporkan swasembada beras dapat dicapai kembali namun untuk jangka panjang masih menjadi pertanyaan besar. Salah satu solusi dalam peningkatan produksi pangan adalah peningkatan areal dan produktifitas. Meskipun hal tersebut telah dilakukan dengan berbagai strategi namun data menunjukkan masih jauh dari cukup. Selama 5 tahun terakhir (2004-2008), areal panen padi hanya meningkat 0,47 juta ha dengan komposisi 11,92 juta ha tahun 2004 menjadi 12,39 juta ha tahun 2008. Dari segi produktifitas mengalami peningkatan 0,32 ton/ha dengan komposisi 4,54 ton/ha tahun 2004 dan 4,86 ton/ha tahun 2008.

Dengan prediksi jumlah penduduk 300 juta tahun 2015, kebutuhan beras akan mencapai 80-90 juta ton/tahun. Menggunakan asumsi luas panen yang tidak akan banyak berubah dari angka 12 juta ha/th, maka solusinya pada tuntutan produktifitas hingga 10 ton/ha. Hal tersebut hampir dipastikan sebuah *mission impossible*. Sejarah produksi beras dunia mencatat bahwa negara yang memiliki sejarah dan tradisi produksi beras paling panjang dan teknologi paling hebat seperti Jepang, Taiwan, Korea dan China hanya mampu memproduksi beras di lahan petani secara stabil dalam skala lapangan paling tinggi 7 ton/ha.

Permasalahan ketahanan pangan

Pangan merupakan sebuah kebutuhan utama bagi kehidupan manusia dan ketersediaan pangan menjadi sebuah isu penting di negeri yang telah berswasembada pada dekade lalu. Beberapa kondisi negatif, khususnya terkait dengan pangan yang terjadi di Indonesia, diantaranya :

1. Kerawanan pangan pernah dan sedang terjadi di berbagai wilayah.
2. Hilangnya budaya bertani di tingkat komunitas lokal yang terjadi akibat gesekan budaya dan tekanan kebutuhan hidup.
3. Sistem ketahanan pangan lokal yang selama ini menjadi sebuah penyangga sistem berkehidupan, secara perlahan berganti dengan keinginan konsumtif.

Ketahanan pangan suatu negara dapat diartikan sebagai kemampuan negara memenuhi kecukupan pangan seluruh penduduk meliputi aksesibilitas (keterjangkauan), stabilitas serta kontinuitas pengadaan dan distribusi. Sedangkan menurut Departemen Pertanian (2000), tujuan ketahanan pangan adalah meningkatkan ketersediaan komoditas pangan pokok dalam jumlah dan aksesibilitas.

Program millennium development goal, salah satunya adalah mengurangi penderitaan kekurangan pangan menjadi 50% pada tahun 2015. Secara umum sebenarnya ketersediaan pangan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap pangan pada 30 tahun terakhir (1975-2005) jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi 30 tahun sebelumnya (1940-1975). Adopsi revolusi hijau meningkatkan suplay bahan pangan dan sekaligus meningkatkan akses terhadap pangan. Namun banyak kritik akibat mengikuti revolusi hijau tersebut, yaitu (1) petani menjadi sangat bergantung pada sarana produksi dari industry, (2) pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan kimia, (3).Kurang terjaminnya keamanan mengkonsumsi produksi pangan, (4) merosotnya

keanekaragaman hayati alam, dan (5) perusakan terhadap tanah pertanian sehingga dikhawatirkan pertanian menjadi tidak sustainable. (IRRI 2004; Sumarno 2006; & Pranadji *et al.* 2004).

Kebutuhan pangan Indonesia masih bertumpu pada satu jenis pangan yakni beras sehingga sangat riskan dan rawan. Jika sewaktu-waktu terjadi kegagalan panen, maka kelaparan akan mengancam. Untuk mengantisipasi kondisi seperti disebutkan di atas, maka GBHN 1999-2004 mengarahkan agar Indonesia mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani dan nelayan, serta peningkatan produksi yang diatur dengan undang-undang.

Ketahanan pangan lebih banyak ditentukan oleh kondisi sosial ekonomi daripada agroklimat, dan akses terhadap pangan ketimbang produksi atau ketersediaan pangan. Masalah dan tantangan yang dihadapi Indonesia untuk mencapai status ketahanan pangan mantap cukup berat. Rata-rata rasio cadangan pangan (beras) terhadap penggunaan baru mencapai 4.38, padahal yang diperlukan untuk mencapai status mantap paling tidak 20%. Angka kemiskinan tahun 2008 masih cukup tinggi yaitu 15.1%, dan perkiraan sementara untuk tahun 2009 sekitar 14.2%, dan jika tak ada terobosan khusus diperkirakan angka kemiskinan tahun 2015 masih akan mencapai sekitar 10.6% atau 26.3 juta orang dimana 18.1 juta diantaranya adalah penduduk pedesaan (Sudaryanto 2009). Angka ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang kurang mampu mengakses pangan masih sangat banyak. Pada tahun 2008 yang lalu, jumlah penduduk yang masih termasuk kategori sangat rawan pangan masih sekitar 25.1 juta orang (11.1%).

Usaha yang harus dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan mencakup aspek kuantitatif maupun kualitatif. Pola konsumsi pangan penduduk Indonesia masih didominasi beras, padahal kebergantungan yang berlebihan terhadap satu jenis komoditas sangat rawan. Pola ini mengakibatkan penyempitan pilihan komoditas yang mestinya dapat dimanfaatkan untuk pangan. Produksi pangan menjadi rawan karena: (i) pertumbuhan produksi padi sangat ditentukan oleh ketersediaan air irigasi yang cukup, sementara itu air irigasi semakin langka, (ii) laju konversi lahan sawah ke non sawah sangat sulit dikendalikan, dan (iii) kemampuan untuk melakukan perluasan lahan sawah (*new construction*) sangat terbatas karena biaya investasinya semakin mahal dan lahan yang secara teknis-sosial-ekonomi layak dijadikan sawah semakin berkurang.

Biofuel vs Ketahanan Pangan

FAO-UE menyimpulkan, biofuel selain menguntungkan juga menciptakan lapangan kerja baru. Namun, manfaat itu amat ditentukan tipe biofuel yang dikembangkan dan siapa yang mengontrolnya. Program biofuel skala kecil yang dikontrol komunitas lokal, melayani kebutuhan mereka sebagai bagian desentralisasi dan sistem produksi pertanian yang terdiversifikasi, berpotensi memberi manfaat kepada pedesaan dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, sangat disayangkan pengembangan biofuel kini berhadapan dengan sistem rantai pangan (*agrifood chain*). Sistem ini menghubungkan mata rantai dari sejak gen sampai rak-rak di supermarket tanpa ada titik-titik penjualan, tidak ada *price discovery*. Artinya, sektor basis biofuel mulai produksi, perdagangan, pengolahan dan ritel tidak hanya terindustrialisasi dan mengglobal, tetapi juga kian terkonsentrasi di segelintir pelaku. Mereka mendominasi pasar pangan dunia melalui empat aktivitas: (i) perusahaan yang bergerak di bidang gen, bibit, dan input agrokimia; (ii) pangan dan serat, perdagangan, dan pengolahan bahan mentah; (iii) perusahaan manufaktur dan pengolahan; dan (iv) supermarket. Seperti pangan, industri biofuel juga mengalami konsentrasi, operasionalnya tersentralisasi, dan hanya dikuasai segelintir penguasa kapital (TNCs).

Kondisi ini, menunjukkan manfaat biofuel sebagai pengikis kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah. Secara teoritis, jika industri biofuel berkembang, pasar produk pertanian kian luas. Produk pertanian tak hanya melayani pasar tradisional (makanan, pakan, dan sandang), tetapi juga industri biofuel. CPO, misalnya, bisa dijual ke industri minyak goreng dan berakhir di pasar atau ke industri biofuel dan berakhir di SPBU. Hal ini akan mendorong kenaikan dan stabilitas harga produk pertanian. Ujung-ujungnya, industri biofuel akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Studi ADB di Asia Pasifik menyebutkan, tiap pertumbuhan sektor pertanian 10% akan menurunkan jumlah orang miskin di pedesaan berkisar 1,5% sampai dengan 12% (Susila, 2008).

Masalahnya, produk pangan untuk biofuel akan mendorong kenaikan harga pangan. Hampir semua pangan penghasil minyak (kedelai, jagung, sawit, gandum, tebu) meroket harganya. Artinya, pengembangan biofuel akan menambah barisan orang miskin. Kenaikan harga pangan akan menurunkan pendapatan riil atau daya beli masyarakat. Akibatnya, warga yang semula tidak miskin menjadi miskin. Bagi negara net-importer pangan atau berpenduduk besar seperti Indonesia, situasi ini akan berdampak luas. Jika tak dikelola dengan baik, kondisi ini akan memunculkan perkelahian urusan perut lawan mesin, warga miskin versus warga kaya. Karena itu, biofuel sebaiknya dibuat dari bahan nonpangan

Memenuhi Kebutuhan Pangan dalam Era Globalisasi

Pangan (nabati dan hewani) adalah produk sektor pertanian dalam arti luas, merupakan sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral-mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia agar dapat melangsungkan kehidupannya. Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat ditunda-tunda, harus tersedia setiap saat, dan dalam jumlah yang cukup. Kekurangan pangan atau rawan pangan menyebabkan kurang gizi, selanjutnya menyebabkan seseorang akan sangat peka terhadap penyakit, lemah, tidak bersemangat, bahkan tidak dapat berpikir baik, sehingga tidak dapat mengikuti program-program pengembangan keahlian, keterampilan atau program sekolah lainnya. Ujung dari semua ini adalah rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan dan akhirnya semakin sulitnya suatu masyarakat menghilangkan kemiskinan.

Ketahanan pangan suatu negara dapat diartikan sebagai kemampuan negara memenuhi kecukupan pangan seluruh penduduk meliputi aksesibilitas (keterjangkauan), stabilitas serta kontinuitas pengadaan dan distribusi. Selama kebutuhan pangan Indonesia masih bertumpu pada satu jenis pangan yakni beras adalah sangat riskan dan rawan. Pearson mengutip proyeksi Tabor *et al.* (1988) yaitu pertumbuhan konsumsi beras akan tetap di atas 2% per tahun sampai tahun 2000, walau laju peningkatan akan menurun dari 2,6% per tahun di awal 1990-an menjadi 2,1% di akhir 1990-an. Proyeksi konsumsi ini mensinyalkan bahwa produksi beras memerlukan pertumbuhan 2,5% per tahun agar Indonesia tetap mampu mempertahankan *self-sufficiency on trend*. Walaupun laju ini hanya separuh dari pertumbuhan produksi selama dua dekade lampau, tetapi pertumbuhan mantap produksi padi 2,5% per tahun bukanlah sesuatu yang mudah dicapai.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan nasional yang terus meningkat, Indonesia dapat melakukan usaha yaitu: (1) mengimpor pangan dari luar negeri sesuai dengan kebutuhan, dan (2) meningkatkan produksi pangan dalam negeri.

Memenuhi Kebutuhan Pangan Melalui Impor

Walaupun dalam era globalisasi perdagangan relatif gampang mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, namun ada beberapa faktor penting yang perlu mendapat perhatian yaitu: (1) kondisi politik dunia, (2) kondisi produksi pangan dunia, dan (3) kondisi atau ketersediaan devisa dalam negeri. Kondisi politik dunia yang kacau, misalnya terjadi perang dunia, maka produksi dan distribusi pangan dunia akan terganggu, akhirnya akan menyulitkan negara-negara yang mengandalkan pangannya dari impor. Bahkan perilaku politik dalam negeripun dapat menjadi ancaman embargo oleh negara-negara produsen pangan. Kondisi produksi pangan dunia mempengaruhi pasokan pangan dunia dan selanjutnya mempengaruhi perdagangan atau pasar pangan dunia. Jika produksi pangan negara-negara produsen menurun, berarti perdagangan pangan dunia tipis, selanjutnya akan mempengaruhi harga pangan dunia. Bahkan ekstrimnya, jika terjadi kegagalan panen di sebagian besar negara-negara produsen pangan, maka persediaan pangan dunia menjadi defisit, sehingga menyulitkan negara-negara importir pangan dunia. Kondisi atau ketersediaan devisa suatu negara importir akan mempengaruhi kuantitas impor pangan. Jika devisa dalam negeri tersedia dalam jumlah yang cukup, maka impor pangan tidak menjadi masalah. Namun sebaliknya, jika devisa dalam negeri langka, maka akan menyulitkan negara-negara importir pangan.

Memenuhi Kebutuhan Pangan Melalui Peningkatan Produksi

Dalam usaha meningkatkan produksi beras untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, Heytens (1991) menganjurkan beberapa strategi yang perlu diambil yaitu: (1) kebijakan

investasi irigasi, (2) kebijakan regulasi, dan (3) kebijakan harga. Kebijakan investasi irigasi memungkinkan terkonversinya lahan-lahan kurang produktif dan lahan telantar menjadi lahan produktivitas tinggi. Di samping itu, perluasan jaringan irigasi memungkinkan pencetakan areal sawah baru sehingga meningkatkan areal tanam dan akhirnya meningkatkan produksi padi. Kebijakan regulasi yaitu mengkonversi areal tebu menjadi areal padi. Secara kasar sebanyak 150.000 ha sawah ditanami tebu di Jawa dalam 1988. Jika sawah seluas itu yang memiliki sistem irigasi teknis baik dan sedang dikonversi menjadi padi, maka produksi padi di Jawa Tengah dan Jawa Timur akan dapat ditingkatkan. Sebagai ilustrasi, jika areal padi sawah yang dapat ditanami sekitar 330.000 ha karena *multiple cropping* tahun 1994, dan jika hasil lahan dikonversi rata-rata 5,25 ton gabah per ha dalam 1989 dan meningkat dengan 0,5% per tahun, maka akan menghasilkan sekitar 1,8 juta ton tambahan produksi gabah per tahun dalam 1994. Kebijakan harga dapat digunakan untuk mempengaruhi produksi padi. Jika target produksi yang diperlukan tidak dapat dicapai dengan kebijakan investasi atau regulasi, maka kebijakan harga adalah pilihan terakhir yang tersedia untuk menawarkan tambahan insentif kepada para petani padi. Heytens (1991) mengutip hasil kajian Altemeir *et al.* (1988) yang mengestimasi elastisitas hasil padi adalah 0,2 dalam tahun pertama dan 0,3 setelah tiga tahun. Karenanya, jika harga padi riil meningkat 10%, maka hasil padi diperkirakan meningkat sekitar 2% setelah satu tahun dan total 3% setelah periode tiga tahun. Dengan demikian kebijakan harga mempengaruhi areal yang ditanami padi dan pada akhirnya mempengaruhi produksi.

KETAHANAN PANGAN

Sebagai negara yang berada di wilayah tropika, Indonesia dianugerahi keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Di daratan maupun lautan tersedia berbagai macam spesies yang potensial untuk didayagunakan sebagai bahan pangan. Walaupun upaya pendayagunaan (diversifikasi pangan) telah dilakukan namun perkembangannya masih lambat. Dalam konteks penyediaan pasokan, diversifikasi adalah salah satu cara adaptasi yang efektif untuk mengurangi risiko produksi akibat perubahan iklim. Diversifikasi juga kondusif untuk mendukung perkembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal. Pada sisi konsumsi, diversifikasi pangan memperluas pilihan pangan dan kondusif untuk mendukung terwujudnya pola pangan harapan. Diversifikasi pangan dapat mendukung stabilitas ketahanan pangan sehingga dapat dipandang sebagai salah satu pilar pemantapan ketahanan pangan.

Dalam mendukung ketersediaan pangan, diversifikasi dalam peningkatan kapasitas produksi terjadi melalui: (1) peningkatan luas baku lahan dan sumberdaya pesisir untuk memproduksi pangan, (2) perbaikan distribusi spasial sumberdaya lahan dan air untuk memproduksi pangan, (3) peningkatan produktivitas air untuk pangan, (4) peningkatan unit-unit usahatani yang memproduksi pangan, dan (5) revitalisasi sebagian kelembagaan lokal yang kondusif untuk keberlanjutan system produksi pangan.

Diversifikasi Pangan Meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional

Mencermati proyeksi konsumsi beras yang masih di atas 2% sampai tahun 2000 dan adanya kendala-kendala teknis dalam meningkatkan produksi beras, maka Heytens (1991) menganjurkan strategi yang paling tepat dari titik pandang keamanan pangan dan efisiensi peningkatan pendapatan petani adalah *self-sufficiency on trend*. Pada strategi ini tampak tersirat kebijakan diversifikasi pangan, yakni meningkatkan produk pangan non beras untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik ketika produksi beras mengalami kegagalan. Diversifikasi diartikan sebagai usaha penganeekaragaman usahatani, baik secara horizontal maupun vertikal. Diversifikasi secara horizontal yang merupakan imbalan pengembangan antar berbagai komoditi dan wilayah, sedangkan diversifikasi secara vertical diartikan pengembangan produksi setelah panen termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan pengolahan hasil dan limbah pertanian sebagai inti dari industrialisasi pertanian. Pengertian diversifikasi juga diterapkan dalam pemilihan lokasi pembangunan, sehingga dalam pengembangan wilayah terjadi keseimbangan antara wilayah maju dan wilayah yang sedang tumbuh. Keuntungan dari diversifikasi horizontal yaitu: (1) Mengurangi resiko dengan menyebarkan resiko tersebut kepada beberapa jenis tanaman. Kegagalan panen satu jenis tanaman,

dapat dikompensasi oleh keberhasilan panen jenis tanaman lainnya, sehingga ketersediaan pangan masih dalam keadaan aman, (2) Menyediakan beranekaragam gizi yang dihasilkan oleh berbagai jenis tanaman, ternak atau ikan yang memang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Sedangkan keuntungan diversifikasi vertikal, yakni tersedianya keanekaragaman berbagai jenis pangan yang dapat meningkatkan nilai dari bahan pangan tersebut dan merubah selera konsumen. Diversifikasi konsumsi sebagai derivasi diversifikasi vertikal sangat penting peranannya dalam mengurangi beban sumberdaya untuk memproduksi satu atau dua komoditas pangan. Penyebaran beban ini akan erat kaitannya, baik dengan kapasitas produksi sumberdaya alam dan kelestariannya, maupun dengan tingkat gizi masyarakat.

Potensi Ketahanan Pangan

Untuk mendukung ketahanan pangan maka sektor kehutanan dapat melalui: (1) mengelola hutan dengan baik sehingga mampu mendukung sistem kehidupan (*life supporting system*) dan menjamin ketersediaan sumber daya (air, biodiversitas) bagi sektor pertanian, sektor perikanan, dan sektor peternakan, (2) meningkatkan penyediaan pangan nabati dan hewani secara langsung (seperti hutan tanaman penghasil pangan nabati maupun hewani) dan secara tidak langsung melalui pemanfaatan lahan di bawah tegakan dan (3) peningkatan akses masyarakat terhadap hutan sehingga masyarakat mempunyai diversifikasi pendapatan.

Dalam konteks pembangunan wilayah perlu dibangun keterpaduan pengembangan sektor pertanian, perikanan dan kelautan kehutanan (PPK) dalam rangka membangun daya saing dan efisiensi serta keberlanjutan pengembangannya. Pengembangan infrastruktur pertanian, lahan pertanian abadi, pengelolaan tata ruang dan lingkungan, serta daya saing sistem usaha tani sepatutnya dalam konteks keterpaduan spasial sektor PPK.

Pengembangan hutan cadangan pangan menganut kaidah kelestarian dimana pelaksanaannya harus memandang hutan sebagai satu kesatuan ekosistem, lengkap dengan keanekaragaman hayati yang dikandungnya. Kegiatan yang dikembangkan tidak merombak hutan, namun diarahkan pada upaya optimalisasi ruang melalui perbaikan struktur dan komposisi hutan. Dengan demikian kegiatan yang dikembangkan adalah :

1. Pemanfaatan lahan bawah tegakan hutan
2. Intensifikasi tumpangsari
3. Pengkayaan jenis.

Pengembangan hutan cadangan pangan lebih diarahkan pada pengkayaan jenis, yaitu kegiatan menanam pohon penghasil bahan pangan disamping tanaman pokok kehutanan, sehingga areal hutan tersebut kaya dengan berbagai jenis tanaman, menghasilkan bahan pangan. Beberapa jenis tanaman yang dapat digunakan dalam kegiatan gerakan hutan cadangan pangan antara lain sukun, nangka, aren, dan jenis lainnya, sehingga kegiatan usaha yang dapat dilakukan adalah pemungutan hasil hutan berupa buah. Manfaat dari “Hutan Cadangan Pangan” adalah pelestarian hutan dapat dijaga, sumber-sumber air terpelihara, memunculkan sumber air baru, dan lahan kritis di sekitar hutan pun lama-lama dihijaukan dan dijadikan hutan baru.

1. *Agro-forestry*
Disamping tanaman pokok kehutanan, juga dilakukan budidaya komoditi penghasil bahan pangan sehingga areal hutan tersebut kaya dengan berbagai jenis tanaman (sumber karbohidrat).
2. *Silvo-fishery*
Disamping tanaman pokok kehutanan (khususnya pada areal hutan mangrove) juga dilakukan budidaya ikan serta komoditi pengairan lainnya sebagai sumber protein hewani.
3. *Silvo-pasture*
Pemanfaatan hutan dengan penanaman dan pengkayaan rumput dan/ hijauan makanan ternak sebagai upaya dalam rangka pemenuhan sumber protein hewani.
Diharapkan konsepsi ini dapat mempertemukan semua kepentingan tersebut (kesejahteraan masyarakat, produktifitas sumber daya hutan dan kelestarian fungsi hutan) merupakan pendekatan yang diharapkan mampu menjadi alternatif solusi dalam kegiatan pengelolaan hutan.

Melalui konsep ini bisa lebih luas dijabarkan dalam pola-pola manajemen lahan hutan yang mampu secara efektif melibatkan masyarakat secara langsung dalam sistem pengelolaan hutan, memberikan kontribusi secara real bagi kesejahteraan masyarakat, secara teknis maupun meningkatkan produktivitas sumber daya hutan dan secara ekologis mampu menjamin kelestarian fungsi hutan.

4. *Lahan-lahan masyarakat*

Pada lahan-lahan masyarakat yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, (tetap memperhatikan kaidah-kaidah konservasi), diharapkan masih dapat dioptimalkan untuk pemenuhan cadangan pangan lokal.

5. *Kawasan hutan*

Pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi (dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku) masih dapat dimanfaatkan dengan tidak merusak serta merubah status dan fungsinya.

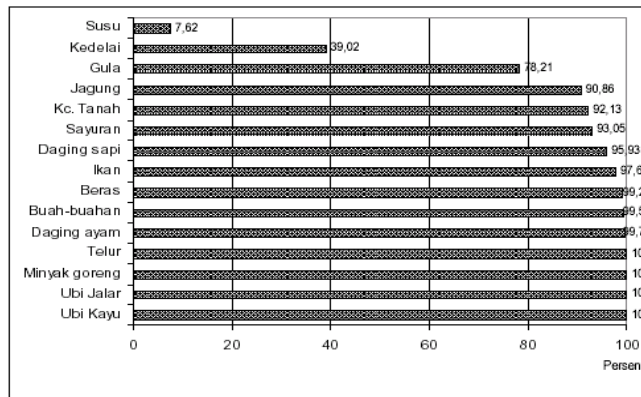
Kemandirian Pangan

Kemandirian pangan di Indonesia telah menjadi sorotan sejak Kongres XI Perhepi dan Kongres ASAE (*Asian Society of Agricultural Economist*) di Bali pada tahun 1986. Kebijakan kemandirian pangan dianggap sebagai cara yang paling aman untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan bila dibandingkan dengan pengadaan pangan melalui impor. Dalam perkembangannya, kebijakan kemandirian pangan telah mewarnai kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang pertanian dan pangan sejak tahun 1970-an. Hal ini dapat dilihat dari kondisi penyediaan pangan yang sebagian besar berasal dari produksi komoditas pangan domestik. Saat ini terjadi silang pendapat mengenai konsep dan pengertian tentang swasembada pangan, kemandirian pangan, kedaulatan pangan, bahkan dengan pengertian ketahanan pangan itu sendiri. Berdasarkan pustaka yang ada perbedaan istilah dan konsep tersebut disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Perbedaan Swasembada, Kemandirian, Kedaulatan dan Ketahanan Pangan

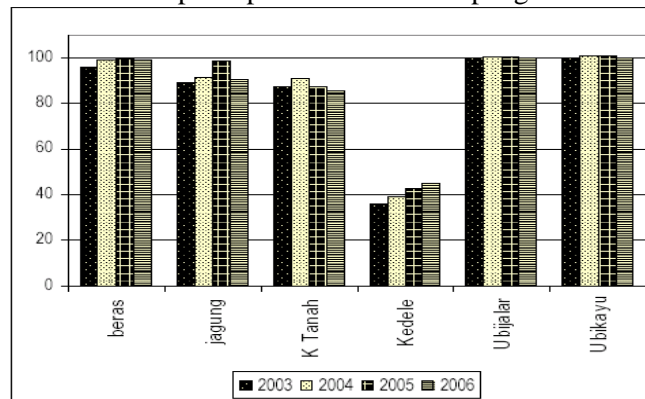
Indikator	Swasembada Pangan	Kemandirian Pangan	Kedaulatan Pangan	Ketahanan Pangan
Lingkup	Nasional	Nasional	Nasional	Rumah tangga dan Individu
Sasaran	Komoditas pangan	Komoditas pangan	Petani pangan	Manusia
Strategi	Substitusi impor	Peningkatan daya saing (promosi ekspor)	Pelarangan impor	Peningkatan ketersediaan pangan, akses pangan dan penyerapan pangan
Output	Peningkatan produksi pangan (dengan perlindungan pada petani)	Peningkatan produksi pangan yang berdaya saing	Peningkatan produksi pangan (dengan perlindungan pada petani)	Status gizi (penurunan kelaparan, gizi kurang dan gizi buruk)
Outcome	Ketersediaan pangan oleh produk domestik (tidak impor)	Ketersediaan pangan oleh produk domestik (impor hanya pelengkap)	Kesejahteraan petani	Manusia sehat dan produktif (angka harapan hidup tinggi)

Swasembada pangan umumnya merupakan capaian peningkatan ketersediaan pangan dengan wilayah nasional, sedangkan ketahanan pangan lebih mengutamakan akses setiap individu untuk memperoleh pangan yang bergizi untuk sehat dan produktif. Kemandirian pangan produk pangan Indonesia sebagaimana disajikan dalam Gambar 1. Jika diasumsikan kemandirian pangan toleransi impornya adalah 10%, maka kemandirian pangan di Indonesia tidak mengkhawatirkan karena hanya beberapa komoditas pangan yang impornya lebih dari 10%. Komoditas susu, kedelai dan gula yang masih belum mandiri.



Gambar 1. Kemandirian Komoditas Pangan Indonesia 2004
(Sumber : Dewan Ketahanan Pangan, 2006 (Diolah))

Perkembangan kemandirian pangan dari komoditas pangan Indonesia disajikan dalam Gambar 2. Secara umum perkembangan kemandirian pangan Indonesia relatif konstan, hal ini disebabkan komoditas pangan di Indonesia daya saingnya rendah. Dalam teori ekonomi kemandirian pangan hanya dapat dilakukan jika ada peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran, tanpa kedua efisiensi tersebut maka pencapaian kemandirian pangan adalah semu.



Gambar 2. Perkembangan Kemandirian Komoditas Pangan Indonesia

PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN KETAHANAN PANGAN

Penelitian Ketahanan Pangan

Penelitian-penelitian tentang ketahanan pangan telah banyak dilakukan. Selain mengembangkan teknologi untuk meningkatkan produksi pangan, juga penelitian-penelitian dalam rangka diversifikasi sumber pangan. Penelitian diversifikasi pangan bertujuan untuk mengembangkan sumber pangan selain beras. Penelitian pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dalam era globalisasi, utamanya pangan karbohidrat non-beras agar berorientasi agribisnis, yaitu penelitian pada setiap subsistem sistem agribisnis pangan non-beras, yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan, pendapatan produsen dan nilai tambah produk pangan tersebut, sehingga semakin kompetitif di pasar domestik dan internasional.

Pengembangan teknologi dengan komponen domestik tinggi harus mendapat perhatian lebih besar. Pemanfaatan internal input pada kondisi lahan yang sudah miskin unsur hara menjadi salah satu alternatif yang cukup terlanjutkan. Integrasi berbagai komoditas dalam suatu sistem produksi dengan memanfaatkan hubungan sinergi antar komponen dapat mengurangi ketergantungan terhadap input eksternal yang berlebihan. Sistem seperti ini sesuai dengan petani dengan pemilikan lahan sempit dalam perspektif agribisnis skala kecil dan menengah.

Memberikan proteksi terhadap beras dalam negeri melalui pengenaan tarif impor sebagaimana telah ditempuh pemerintah akhir-akhir ini disertai dengan perbaikan sistem pemasaran

hasil dan pembangunan infrastruktur pedesaan. Namun tingkat tarif *ad-valorem* yang dikenakan perlu mempertimbangkan harga beras di pasar dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Untuk menjaga stabilitas pengadaan pangan khususnya beras, kegiatan produksi dalam negeri masih perlu diproteksi baik dalam bentuk subsidi harga input maupun pengenaan tarif impor produk pangan.

Memanfaatkan sumber-sumber pertumbuhan produksi pertanian yang dihela oleh permintaan pasar melalui: (1) perluasan areal tanam (ekstensifikasi dan peningkatan indeks pertanaman), (2) peningkatan produktivitas dengan penerapan teknologi spesifik lokasi, (3) peningkatan stabilitas hasil dengan sistem peringatan dini, (4) menekan senjang hasil antar hasil penelitian dan tingkat petani maupun antara wilayah melalui karakterisasi dan zonasi sumber daya dengan lebih akurat, dan (5) menekan kehilangan hasil panen dan pasca panen melalui pengembangan alat dan mesin pertanian secara partisipatif.

Pengalaman-pengalam menunjukkan bahwa mekanisme pasar saja tidak cukup untuk menjamin dan ketahanan dan pemenuhan pangan. Peran pemerintah untuk mengatur secara adil agar yang kuat tidak mengeksploitasi yang lemah, tetapi harus mendorong kerjasama dan sinergi antara berbagai pihak dalam masyarakat. Ketahanan pangan akan terwujud secara mandiri apabila dibangun berdasarkan totalitas ketahanan pangan rumah tangga, lokal dan regional. Adanya kecenderungan meninggalkan perubahan pola konsumsi yang meninggalkan budaya pangan lokal harus dikurangi dengan melakukan proteksi dan promosi pangan lokal.

Subtansi ketahanan pangan meliputi aspek ekonomi, sosial dan budaya yang memiliki tiga unsur dasar yaitu (1) kemampuan memanfaatkan sumber daya alam untuk menghasilkan bahan-bahan pangan, (2) kehidupan masyarakat, dimana individu hanya merupakan subordinasi masyarakat, (3) pengolahan produk lebih lanjut dari hasil-hasil langsung agar hasil-hasil pangan dapat disimpan lama sehingga dapat diperdagangkan dengan cakupan daerah yang lebih luas.

Lesson Learning: Kearifan Lokal dan Ketahanan Pangan

Dalam hubungannya dengan ketahanan pangan, Soekartawi (1993) menganjurkan untuk menggali potensi tanaman tradisional (lokal) yang sudah terbiasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Komoditi uji jalar, ketela pohon, bentul, “uwi”, gembili, dan masih banyak ragam makanan lokal seolah-olah tertinggalkan. Padahal komoditi tersebut merupakan sumber pangan utama masyarakat golongan miskin. Juga dianjurkan untuk menggali potensi diversifikasi pangan yang dikonsumsi golongan miskin, dengan tetap memperhatikan kandungan gizi. Suhardi, seorang pakar kehutanan UGM telah mengidentifikasi sekitar 26 jenis pangan yang tumbuh di areal kehutanan dan perkebunan, di antaranya singkong, ubi jalar, jagung, suku, garut, talas, gembili, ganyong dan jenis pangan lainnya. Hutan dan kebun diperkirakan dapat menghasilkan pangan sebanyak 1.560 juta ton per tahun, sehingga Indonesia dapat menjadi pusat cadangan pangan dunia. Hasil tumpangsari dalam hutan sebenarnya cukup banyak dan dapat dikembangkan antara lain ketela pohon, garut, ganyong, gembili dan sebagainya. Produk yang paling menonjol dan dapat dikembangkan secara besar-besaran untuk menghadapi rawan pangan dengan nilai sepadan dengan beras dan gandum adalah ketela pohon, ganyong dan garut (Sinta 2000).

Munculnya *trade-off* antara tujuan keamanan pangan (*food security*) dan peningkatan pendapatan petani padi (*income growth*), maka dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan nasional dapat dipertemukan dalam strategi kebijakan trend swasembada (*self-sufficiency on trend*), artinya, melakukan ekspor ketika produksi beras surplus dan mengimpor ketika produksi beras defisit, karena strategi swasembada beras absolut (*absolute self-sufficient*) tidak dapat dipertahankan. Meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga dan nasional yang dihadapkan pada pengurangan ketergantungan pangan impor dan ketergantungan pada satu jenis sumber pangan yakni beras, maka diversifikasi pangan harus digalakkan kembali, misalnya dengan menginventarisasi dan mengevaluasi sumber-sumber pangan karbohidrat non-konvensional seperti umbi-umbian yang banyak tumbuh di hutan-hutan dan lahan-lahan perkebunan. Penelitian pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dalam era globalisasi, utamanya pangan karbohidrat non-beras agar berorientasi agribisnis. Artinya penelitian pada setiap subsistem dari sistem agribisnis pangan non-beras, yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan,

pendapatan produsen, dan nilai tambah produk pangan tersebut, sehingga semakin kompetitif di pasar domestik dan internasional.

Gerakan kearifan lokal sangat penting untuk membangun ketahanan pangan dan bantalan menghadapi berbagai krisis yang terjadi di dunia. Salah satu gerakan kearifan lokal yang perlu dilakukan adalah memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya alam di seluruh daerah sehingga Indonesia mampu mencukupi segala kebutuhannya sendiri. Kedepan, nampaknya produksi beras nasional tidak akan cukup hanya dipasok dari lahan-lahan subur saja, mengingat perkembangan penduduk yang masih besar 1,5%, sementara pertanian pada tahun 2006 baru mencapai 0,89% untuk Pulau Jawa dan 1,91% untuk Luar Jawa (Krisna Murti, 2006). Sehingga upaya peningkatan produksi sebesar dua juta ton dalam program P2BN tentu akan sulit dicapai tanpa mengikutkan sertakan lahan rawa lebak yang punya potensi sangat besar, tetapi pemanfaatannya belum optimal (Alihamsyah dan Ar-Riza, 2004).

Kondisi yang dipaparkan di atas, memang cukup merisaukan masa depan sistem pertanian kita. Sebenarnya petani kita, utamanya petani padi lahan rawa lebak, telah mempunyai setumpuk pengalaman yang diperoleh dari berbagai pengamatan dan kegiatan yang telah dikerjakan dalam masa yang lama dari generasi ke generasi, sehingga mempunyai kearifan dalam mengatasi berbagai masalah lingkungan, yang sering disebut sebagai "kearifan ekologi" maupun "kearifan lokal" (Soemarwoto 1982). Sehingga kearifan lokal tersebut sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan inovasi teknologi baru dalam memajukan pembangunan pertanian.

Fenomena munculnya padi organik sebagai salah satu upaya pemenuhan kualitas produksi yang akhir-akhir ini mulai bergema, sebenarnya telah lama dilaksanakan oleh petani lahan rawa dan terbukti mampu mempertahankan daya dukung lahan, sehingga tidak mengalami degradasi dan tetap lestari walaupun pada rerata hasil yang belum tinggi. Lahan rawa lebak memiliki potensi dan prospek besar untuk di manfaatkan sebagai areal produksi pertanian, khususnya padi dan merupakan salah satu pilihan strategis bagi peningkatan produksi pangan nasional dan dapat dijadikan sebagai lahan abadi untuk mempertahankan produksi pangan nasional. Petani lokal di lahan rawa lebak Negara, Kalimantan Selatan, sejak lama dan sudah lebih dari ratusan tahun memanfaatkan lahan rawa untuk bercocok tanam padi, palawija dan berbagai jenis tanaman hortikultura. Padi merupakan tanam utama dan dapat di kembangkan hampir di semua jenis lahan rawa lebak dari lahan lebak rawa dangkal sampai ke lahan rawa lebak dalam. Dengan memahami kondisi lingkungannya dan belajar dari pengalaman, petani telah berhasil mengembangkan lahan rawa lebak menjadi daerah pertanian yang subur dan berproduktivitas tinggi, ramah lingkungan dan kelestarian produksi.

Makan bukanlah sekedar mengisi perut kosong atau mengenyangkannya, dan persoalan makanan bukanlah persoalan tentang kandungan gizi secara medis saja melainkan juga persoalan kebudayaan, yakni kepercayaan tentang makanan dan kebiasaan makanan (*food habit*). Kepercayaan makanan dan kebiasaan makanan bukanlah sesuatu yang mudah diubah, karena kepercayaan makanan atau biasa disebut dengan ideologi makanan merupakan inti kebudayaan yang sulit untuk berubah. Jadi, dari segala aspek tadi, seyogianya program-program pembangunan mengedepankan faktor sosial budaya dalam masyarakat, bukan hanya pembangunan fisik semata yang dijadikan indikator kemajuan masyarakat. Kearifan lokal dalam masyarakat dapat dijadikan sebuah energi positif untuk kesejahteraan rakyat.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa ketahanan pangan selain menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang memadai, juga harus menjamin kemampuan masyarakat untuk mengakses sumber pangan. Ketahanan pangan juga harus diartikan sebagai kemandirian pangan yaitu tidak bergantung pada pihak dalam penyediaan pangan yang memadai artinya kecukupan jumlah pangan harus mampu dipenuhi oleh diri sendiri sebagai sebuah bangsa dan negara.

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan kemandirian pangan tersebut, beberapa pertanyaan yang harus dijawab melalui penelitian ilmiah antara lain :

1. Untuk meningkatkan posisi tawar profesi petani, bagaimanakah model pemberian insentif ke petani sehingga petani mempertahankan lahan pertaniannya dan tetap menanam?
2. Jika untuk mengatasi kelangkaan kepemilikan lahan oleh petani negara memberikan lahan kepada petani (*land reform*), bagaimanakah model pembagian lahan tersebut dilaksanakan ?
3. Dalam rangka diversifikasi sumber pangan, bagaimanakah mengubah pola konsumsi masyarakat yang terpaku pada komoditas beras sebagai bahan pangan ?

DAFTAR PUSTAKA

- Alihamsyah T, I Ar-Riza. 2004. Potensi dan teknologi pemanfaatan lahan rawa lebak untuk pertanian. Makalah Utama. Workshop Nasional Pengembangan Lahan Rawa Lebak. Kerjasama Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa-Pemda Kabupaten Hulu Sungai-Dinas Pertanian Prop.Kalimantan Selatan, Kandangan, tgl 11-12 Oktober 2004.
- Altemeir K, Tabor S, Adinugroho B. (1988), 'Supply Parameters for Indonesian Agricultural Policy Analysis', *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, 36(1), 111-30.
- BPS, 2008. Statistika Indonesia, Jakarta.
- Deptan. 2000. "Kebijaksanaan dan Program Utama Pembangunan Pertanian". Departemen Pertanian RI., Jakarta, Januari 2000.
- Heytens Paul. 1991. "Policy Alternative for Future Rice Production Growth". In Rice Policy in Indonesia. Cornell University Press, Ithaca and London Pp. 114-137.
- IRRI. 2004. IRRI's Environment Sustainable Development. IRRI, Los Banos, Philippines.
- Krisnamurti B. 2006. Produksi padi nasional naik minimum sama dengan kenaikan penduduk 1,5 %. Sinartani . Edisi 8-14 Maret 2006. no. 3140.Th xxxVI. Hal.5. Policy in Indonesia. Cornell University Press, Ithaca and London Pp. 114-137.
- Pranadji T, Saptana, WK Sejati. 2005. Pengelolaan Serangga dan Pertanian Organik Berkelanjutan di Pedesaan. Forum Penel Agroekonomi, Vol. 23 (1): 38-47.
- September. 2000. No, 2858 Tahun XXXI. PT. Duta Swasta Karya, Jakarta. Soekartawi. 1993. "Pangan dan Gizi Masyarakat Miskin". Dalam Kompas, Jumat 15 Oktober 1993. PT Gramedia, Jakarta.
- September 2000. No, 2858 Tahun XXXI. PT. Duta Swasta Karya, Jakarta.
- Sinta. 2000. 'Saatnya Menggali Potensi Pangan dari Hutan'. Dalam Sinar Tani, 6-12
- Soekartawi, M Amin. 1993. Beberapa perubahan mendasar pasca swasembada beras. Majalah Prisma, 5: 25-33
- Soekartawi. 1993. "Pangan dan Gizi Masyarakat Miskin". Dalam Kompas, Jumat 15 Oktober 1993. PT Gramedia, Jakarta.
- Soemarwoto, Otto. 1982. Makro kosmos dan mikrokosmos dalam membangun lingkungan yang serasi. Materi Kuliah. Pasca Sarjana Ilmu-Ilmu Pertanian. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sumarno. 2006. Merakit Teknologi Revolusi Hijau Lestari untuk Ketahanan Pangan Nasional di Masa Depan. Seminar Nasional Sumber Daya Lahan Pertanian. BBPSDL, Bogor.
- Tabor SR, HH Dillon, MH Sawit. 1999. Understanding The Food Crisis: Supply, Demand, or Policy Failure?. Paper presented at International Seminar on Agricultural Sektor During the Turbulence of Economic Crisis: Lessons and Future Directions, Bogor, 17-18 February 1999